

Senator Nono Sampono: Disparitas Antara Wilayah Timur dan Barat Indonesia Harus di Tuntaskan

Senayan (26/08)- Ketua Kaukus Indonesia Wilayah Timur DPD RI dan mantan Komandan Korps Marinir Angkatan Laut, Nono Sampono menegaskan bahwa masalah disparitas atau kesenjangan antara wilayah Indonesia timur dan Barat harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Saat ini daerah-daerah di Indonesia Wilayah Timur jauh mengalami ketertinggalan dalam segala aspek baik pembangunan, pendidikan dan Sumber Daya Manusia bila dibandingkan dengan Indonesia Wilayah Barat.

“Disparitas antara wilayah Indonesia Timur dengan Wilayah Indonesia Barat harus menjadi agenda utama pemerintah untuk sesegera mungkin diselesaikan.” jelas Nono sampono di sela-sela wawancara.

Menurut Senator Indonesia dari Provinsi Maluku ini, fenomena seringkali terjadi gangguan keamanan dan ketertiban seperti bentrok antar warga dengan warga atau bentrok antar warga dengan aparat, bahkan munculnya gelombang pemberontakan di Indonesia wilayah Timur tidak bisa dinafikan lantaran merasa pembagian kue pembangunan mengalami kesenjangan dan ketidakadilan antara wilayah timur dan wilayah barat.

“Hemat saya, terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan pemerintah terhadap Indonesia wilayah timur menjadi penyebab rentan timbulnya aksi-aksi seperti bentrok, pertikaian, bahkan munculnya pemberontakan” Ungkap mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut ini dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Mantan Kepala Basarnas RI ini juga menerangkan bahwa realita saat ini hasil kekayaan alam baik dari kekayaan laut maupun pertambangan sangat besar menyumbang devisa negara (APBN), akan tetapi dana yang kembali ke wilayah timur sangat sedikit. Walaupun sekarang melalui UU No 6 Tentang Desa menyebutkan adanya program peningkatan dana desa, akan tetapi tetap saja sedikit mengucur ke wilayah timur Indonesia mengingat jumlah desa di wilayah timur lebih sedikit bila dibandingkan dengan wilayah Barat. Selain itu bisa kita ambil contoh ilustrasi bagaimana bisa Provinsi Maluku membangun pelabuhan-pelabuhan besar kalau bantuan dari APBN sama dengan bantuan untuk Kota Malang. Padahal Maluku sebagai provinsi Kepulauan membutuhkan dana yang besar dalam membangun pelabuhan, sedangkan kota Malang tidak membutuhkan pelabuhan.

“Hasil dari Sumber Daya Alam kita wilayah Indonesia Timur baik dari kekayaan laut maupun pertambangan dan sebagainya sangat besar dalam menyumbang dana APBN Indonesia, tetapi sangat minim kembali ke wilayah Indonesia Timur.” Ungkap Putra Maluku yang pernah menjabat Komandan Paspamres ini.

Di penghujung dialog, Nono Sampono menyampaikan bahwa perlu regulasi (UU) khususnya yang mengatur percepatan pembangunan Indonesia Wilayah Timur. Sehingga

meminimalisir terjadi kesenjangan terlalu jauh dengan Indonesia Wilayah Barat. Selain itu, Otonomi Khusus (Otsus) yang diperoleh Provinsi Papua dan Papua Barat tidak bisa menjadi tolak ukur perhatian pemerintah terhadap Indonesia Wilayah Timur. Karena masih ada provinsi dan banyak kabupaten-kabupaten lain di wilayah Indonesia Timur dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan terbelakang.

“Saya Pikir perlu regulasi atau UU khusus untuk mendorong percepatan pembangunan di Wilayah Indonesia Timur. Setidaknya regulasi ini dapat mengurangi kesenjangan terlalu jauh antara Indonesia Wilayah Timur dan Indonesia Wilayah Barat” Demikian tutup Dr. Nono Sampono, M.Si

Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si
Ketua Kaukus Indonesia Wilayah Timur DPD RI, Anggota DPD RI Dapil Maluku Periode 2014-2019; Mantan Komandan Korps Marinir; Mantan Komandan Paspampres, Mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut